

## ANALISIS DISPARITAS EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

Heni Sugiharti, Zainuri, Lilis Yuliatl  
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

### Abstract

*The purpose of this study was to measure the degree of disparity in economic growth that occurred in each district in Banyuwangi and determine the effect of economic growth, the number of residents, the quality of human resources, the agglomeration production, the Local Budget side of Expenditure, the distance among districts with the central district and unemployment on the economic disparity in Banyuwangi. This research is explanatory research conducted in the district of Banyuwangi. The method of this analysis is using the Williamson Index analysis, Typology Klasen and Multiple Linear Regression Analysis. The results showed the level of disparities between districts in Banyuwangi occurred fluctuated from 2009 to 2013, the imbalances that occur in each region due to the differences in resource potential and the state of infrastructure (roads, land transportation, sea ports and air, telecommunications networks and other). The analysis also showed the disparities condition of each district in Banyuwangi. Based on the results of multiple linear regression analysis showed that individually economic growth and Local Budget expenditure side gives significant negative effect on the economic disparity in Banyuwangi. Agglomeration production takes the positive significant effect on the economic disparity in Banyuwangi, while the number of population, the quality of human resources, the distance the sub-district and unemployment does not significantly influence to the economic disparity in Banyuwangi.*

**Keywords:** *economic disparity, economic growth, agglomeration production, the expenditure budget.*

### 1. Pendahuluan

Disparitas pembangunan pada prinsipnya merupakan disparitas ekonomi yang mengandung makna kemiskinan dan kesenjangan. Disparitas ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. Agar disparitas dan perkembangan antar suatu daerah dengan daerah lain tidak menciptakan jurang yang semakin lebar maka implikasi kebijaksanaan terhadap siklus perkembangan dari pembangunan haruslah dirumuskan secara tepat (Suryana, 2000 :29). Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang sedang tumbuh pesat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun 8 tahun terakhir memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Banyuwangi pada tahun 2012 hampir menyamai pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi, dimana pertumbuhan ekonomi Banyuwangi adalah sebesar 7,27 persen dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur adalah sebesar 7,22 persen. Pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Timur mengalami perlambatan begitu juga di Kabupaten Banyuwangi. Namun walaupun mengalami perlambatan tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi masih diatas tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 6,76 persen sedangkan di Jawa Timur sebesar 6,56 persen.



Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kecamatan 2013 (Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa tingkat pertumbuhan di level kecamatan memiliki tingkat pertumbuhan yang beragam. Wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah di Kecamatan Muncar yaitu sebesar 8,03 persen sedangkan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah adalah di Kecamatan Wongsorejo yaitu sebesar 5,14 persen. Berdasarkan gambar tersebut memperlihatkan bahwa terdapat daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun juga terdapat daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, hal tersebut memperlihatkan dinamika pembangunan yang beragam berdasarkan potensi yang ada di tiap wilayah. Terdapat faktor-faktor yang terdapat di setiap wilayah yang mampu mendorong wilayah tersebut dapat tumbuh cepat dan faktor – faktor yang membuat wilayah tersebut tumbuh relatif lebih lambat

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu :

- Bagaimanakah tingkat disparitas ekonomi yang terjadi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi?
- Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah Penduduk, kualitas SDM, aglomerasi produksi, APBD sisi pengeluaran, jarak kecamatan dengan pusat kabupaten dan pengangguran terhadap disparitas ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

**2. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian explanatory research. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan melakukan pengujian hubungan terhadap semua variable yang diteliti (causal research). Dimensi waktu riset melibatkan waktu tertentu dengan banyak sampel (cross sectional), sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan kontak langsung maupun tidak langsung Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dengan melihat tingkat perkembangan ekonomi di tingkat kecamatan. Alasan pemilihan wilayah penelitian di Kabupaten Banyuwangi adalah dikarenakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kinerja pertumbuhan ekonomi di wilayah Banyuwangi sangat baik dimana pencapaian pertumbuhan ekonomi mampu menyamai pertumbuhan ekonomi di tingkat Propinsi.

**2.1 Analisa Tingkat Disparitas Wilayah**

Pengukuran tingkat disparitas wilayah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Indeks Williamsons, dimana alat analisis ini lazim digunakan dalam pengukuran disparitas pembangunan antar wilayah.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

- Y<sub>i</sub> = PDRB per kapita Kecamatan i
- Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi
- f<sub>i</sub> = Jumlah penduduk Kecamatan i
- n = Jumlah penduduk seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

**2.2 Analisa Tipologi Klassen**

Tipologi klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Adapun pengklafisifikasian tersebut digambarkan dalam kuadran tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Klasifikasi Tipologi Klassen

		PDRB Perkapita (y)	
		y <sub>1</sub> > y	y <sub>1</sub> < y
Laju Pertumbuhan (r)	r <sub>1</sub> > r	1. Daerah cepat majudan cepat tumbuh (r <sub>1</sub> > r dan y <sub>1</sub> > y)	2. Daerah BerkembangCepat r <sub>1</sub> > r dan y <sub>1</sub> < y
	r <sub>1</sub> < r	3. Daerah MajuTapiTertekan (r <sub>1</sub> < r dan y <sub>1</sub> > y)	4. Daerah RelatifTertinggal (r <sub>1</sub> < r dan y <sub>1</sub> < y)

### 2.3 Mengukur determinan faktor yang mempengaruhi Disparitas

Penelitian ini mencoba untuk menganalisa determinan faktor yang mempengaruhi disparitas. Untuk mendapatkan gambaran determinan faktor yang mempengaruhi disparitas wilayah digunakan analisis regresi linier.

$$Y = a + b_1 X_{pe} + b_2 X_{jp} + b_3 X_{sdm} + b_4 X_{ap} + b_5 X_{apbd} + b_6 X_{jrk} + b_7 X_p$$

dimana:

Y	:	Indeks Williamsons
X <sub>pe</sub>	:	Pertumbuhan Ekonomi Per Kecamatan
X <sub>jp</sub>	:	Jumlah Penduduk Per Kecamatan
X <sub>sdm</sub>	:	Kualitas SDM
X <sub>ap</sub>	:	Aglomerasi Produksi
X <sub>apbd</sub>	:	APBD Sisi Pengeluaran
X <sub>jrk</sub>	:	Jarak Kecamatan dengan Pusat Kabupaten
X <sub>p</sub>	:	Pengangguran

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi merupakan sumbangsih dari potensi-potensi yang terdapat di Kecamatan. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi beragam mulai dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta sumberdaya yang lainnya. Perbedaan tersebut akan melahirkan kondisi pencapaian kondisi perekonomian yang berbeda pula.

Berdasarkan gambaran perkembangan tingkat PDRB perkapita dan disparitas wilayah dengan menggunakan penghitungan Indeks Williamsons dimasing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi nampak terlihat terdapat wilayah dengan pertumbuhan PDRB perkapita yang meningkat dan ketimpangan wilayahnya menurun. Namun terdapat pula daerah dengan PDRB perkapitanya yang meningkat namun ketimpangan wilayahnya juga meningkat. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan Myrdal (1976) efekbackwash adalah suatu efek ketika daerah yang mengalami kemajuan akan semakin maju dan daerah yang mengalami ketertinggalan akan semakin tertinggal, hal ini karena perbedaan dari modal, tenaga kerja, keterampilan, teknologi, dan fasilitas publik yang berbeda pada tiap-tiap daerah. Dari segi modal, modal yang tersedia di daerah yang maju pasti lebih banyak karena dengan perkembangan ekonomi yang pesat jelas terdapat perputaran uang yang tinggi pula sehingga meningkatkan pendapatan dari masyarakat di daerah tersebut. Sesuai dengan hukum ekonomi bahwa peningkatan pendapatan akan dapat meningkatkan konsumsi dan tabungan masyarakat, dan peningkatan tabungan masyarakat menjadi penyebab dari tersedianya modal yang besar di daerah tersebut. Pada daerah yang tertinggal dengan ekonomi yang lesu maka pendapatan masyarakat akan kecil sehingga tabungan masyarakat juga kecil yang mengakibatkan jumlah modal yang tersedia juga kecil, bahkan tidak menutup kemungkinan modal yang sedikit tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi yang ada di daerah maju.

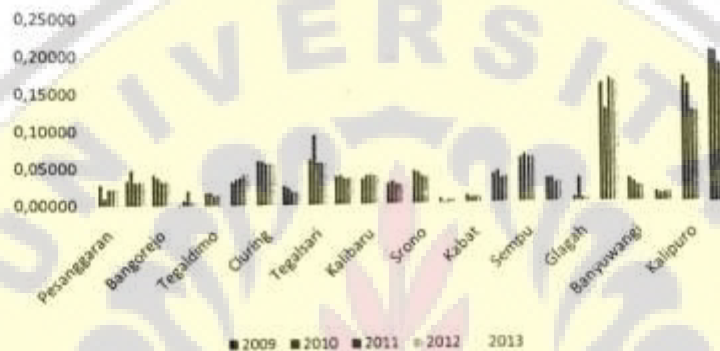
Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Taylor (1975) dalam Sukirno, memperlihatkan corak perubahan struktur ekonomi menggunakan data dari berbagai negara dalam kurun waktu tertentu, dalam analisisnya proses perubahan struktur ekonomi ada hubungannya antara pendapatan perkapita dengan persentase sumbangan berbagai sektor ekonomi pada produksi nasional (Sukirno, 1995).

Chenery dalam penjelasannya mengungkapkan salah satu faktor terjadinya penyebab pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan berimbas pada terjadinya perbedaan pendapatan perkapita antara daerah satu dengan yang lain adalah dikarenakan keuntungan berbanding (Comparative Advantage) yang dimiliki tiap negara atau daerah yang berbeda-beda. Negara atau daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor primer akan memproduksi barang primer dan mengimpor barang sekunder, sedangkan negara atau daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor sekunder akan memproduksi barang sekunder dan mengimpor barang primer. Kemudian dengan sifat alami manusia yang apabila terjadi peningkatan pendapatan maka proporsi pembelian barang primer akan menurun dan proporsi pembelian barang sekunder akan meningkat, hal ini mengakibatkan perbedaan pendapatan perkapita antar daerah yang semakin meningkat. Komparasi antara PDRB perkapita dan Indeks Williamsons ini juga dapat menjadi gambaran bagaimana pola pengembangan perekonomian wilayah kedepan. Bagaimana upaya peningkatan PDRB perkapita wilayah namun jangan sampai memicu terjadinya ketimpangan wilayah yang semakin meningkat.

Berdasarkan hasil analisa didapatkan gambaran mengenai kondisi disparitas masing – masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Tiga wilayah yang memiliki Indeks Williamsons tertinggi atau wilayah dengan tingkat disparitas ekonomi tertinggi adalah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro dan Licin. Jika diamati dari sisi pertumbuhan ekonomi ketiga wilayah tersebut tumbuh positif dengan tingkat PDRB dan PDRB perkapita yang termasuk tertinggi di Kabupaten Banyuwangi dengan Indeks Williamsonsnya yang menunjukkan tren penurunan walaupun nilai Indeks Williamsonsnya masih tinggi dibandingkan Wilayah Kecamatan lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tidak menjadi ukuran bagi pengurangan ketimpangan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Wongsorejo dan Kalipuro ditunjang dengan sumbangan sektor besar seperti industri dan transportasi laut. Sesuai dengan faktor produksi kondisi sektor tersebut dapat ditingkatkan produksinya dengan menggunakan faktor teknologi, maka dengan mengganti mesin-mesin produksi yang lebih canggih dan besar akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat pertumbuhan dapat berkembang cukup tinggi.

Wilayah yang kondisi pertumbuhan ekonominya positif namun terjadi peningkatan nilai ketimpangannya atau tingkat pertumbuhan ekonominya tidak dapat menurunkan tingkat disparitas ekonomi wilayah adalah wilayah Kecamatan Muncar, Siliragung, Pesanggaran, Cluring, Kalibaru, Sempu, Songgon. Wilayah – wilayah tersebut jika dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB perkapita terlihat tren yang meningkat namun jika dilihat dari sisi tren Indeks Williamsonsnya relatif meningkat ataupun tetap.

Kondisi wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif dan terjadi penurunan tingkat Indeks Williamsons mengindikasikan bahwa kondisi pembangunan ekonominya dapat menghasilkan pemerataan, sedangkan untuk wilayah yang pertumbuhan ekonominya tumbuh positif namun tingkat Indeks Williamsonsnya semakin meningkat mengindikasikan tidak terjadinya pemerataan ekonomi dari hasil pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.



Gambar 2 Penghitungan Ketimpangan Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 – 2013

Disparitas tertinggi berdasarkan penghitungan Indeks Williamsons adalah berada di Kecamatan Wongsorejo dengan nilai indeks sebesar 0.17307, sedangkan kecamatan terbesar kedua adalah Kecamatan Licin dengan nilai indeks 0.15772, dan terbesar ketiga adalah Kecamatan Kalipuro dengan indeks sebesar 0.12227.

Wilayah dengan Indeks Williamson terendah pada tahun 2013 adalah Kecamatan Glagah dengan nilai indeks sebesar 0.00479. Kecamatan lainnya yang memiliki nilai indeks terendah adalah Kecamatan Purwoharjo dengan nilai indeks 0.00564 dan terendah ketiga adalah Kecamatan Rogojampi dengan nilai indeks sebesar 0.00638.

Tabel 2 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Pendekatan Tipologi Klassen Tahun 2013

PDRB per Kapita (y) Laju pertumbuhan (r)	$Y_i < y$	$Y_i > y$
$r_i > r$	<b>Daerah Berkembang Cepat</b> Bangorejo Tegaldimo Cluring Gambiran Tegalsari Glenmore Kalibaru Genteng Srono Giri	<b>Daerah Cepat Maju dan Tumbuh</b> Muncar Rogojampi Kabat Glagah Banyuwangi
$r_i < r$	<b>Daerah Relatif Tertinggal</b> Pesanggaran Siliragung Singojuruh Songgon	<b>Daerah Maju Tapi tertekan</b> Purwoharjo Sempu Licin Kalipuro Wongsorejo

Pola pertumbuhan ekonomi antar Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari pola sebaran (agregat) pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Jika menggabungkan hasil analisis tipologi kelas dari masing-masing kecamatan, maka dapat dilihat pola sebaran pertumbuhan ekonomi antar kecamatan. Dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, hanya ada 5 (lima) kecamatan yang masuk dalam kuadran I atau cepat-maju dan cepat tumbuh. Adapun 3 (tiga) dari 5 (lima) kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang cukup besar yaitu Muncar, Rogojampi dan kecamatan Banyuwangi. Ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu keberadaan kecamatan ini di kuadran I ada hubungannya dengan kontribusi sektoral perekonomiannya dimana peranan sektor pertanian, industri pengolahan pertambangan, perdagangan, hotel dan restoran sangat dominan. Selain itu Pembangunan Bandara Blimbingsari yang merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ternyata memberikan kontribusi yang luar biasa dan berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di lokasi bandara tersebut (Kecamatan Rogojampi dan Kabat) dan menjadi peluang pintu masuk para investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Banyuwangi.

Terdapat 10 (sepuluh) kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi tersebar di kuadran ini. Jumlah tersebut relatif dominan, artinya sebagian besar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi berada pada kuadran II ini. Kecamatan ini disebut dengan daerah berkembang cepat (growing region). Ini memberikan arti bahwa kecamatan di kuadran ini mempunyai prospek tumbuh lebih baik lagi pada masa mendatang apabila proses investasi, perbaikan infrastruktur dan fasilitas dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat terus berlangsung dengan iklim investasi tetap baik. Kecamatan yang terdapat di kuadran III ini sebanyak yaitu 5 kecamatan. Kecamatan yang terdapat di kuadran III ini disebut dengan "Daerah maju tapi tertekan" (Retarded region) yaitu kota yang tingkat ekonominya lebih maju tetapi laju pertumbuhannya sedang melambat. Terdapat 4 kecamatan tersebar di kuadran IV. Kecamatan yang terdapat di kuadran ini disebut dengan "Daerah maju tapi tertekan" (retarded region) yaitu kota yang tingkat ekonominya lebih maju tetapi laju pertumbuhannya sedang melambat.

Implikasi kebijakan dari hasil analisis Tipologi Klassen adalah dengan mengidentifikasi sektor basis dari masing-masing kecamatan sehingga dapat merumuskan kebijakan yang diarahkan untuk menggerakkan sektor yang menjadi basis dari perekonomian di kecamatan tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kecamatan tersebut; menganalisis keterkaitan ekonomi antar sektor di kecamatan, karena keterkaitan ekonomi antar sektor merupakan unsur penting dalam proses pembangunan ekonomi daerah karena dengan adanya keterkaitan tersebut akan dapat diwujudkan pembangunan ekonomi yang saling menunjang dan bersinergi satu sama lainnya. Keterkaitan ini dapat bersifat kedepan (Forward Linkage) ke jalur output, maupun keterkaitan kebelakang (Backward Linkage) ke jalur input. Melalui kedua bentuk keterkaitan ini akan dapat diwujudkan proses pembangunan yang efisien dan saling mendukung sehingga perekonomian daerah akan bertumbuh lebih cepat; Daerah-daerah yang relatif tertinggal yang memiliki potensi di sektor wisata perlu strategi meningkatkan pengembangan dan promosi wisata beserta faktor pendukungnya.

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Panel

Variabel	Koefisien (Beta)	Std Error Koefisien	T	Sig.
Konstanta	0.299	0.064	4.674	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi ( $X_{pe}$ )	-0.032	0.006	-5.785	0.0000
Jumlah Penduduk ( $X_{jd}$ )	$-4.47 \times 10^{-7}$	$2.29 \times 10^{-7}$	-1.957	0.0548
Kualitas SDM ( $X_{kdm}$ )	-0.046	0.029	-1.613	0.1117
Aglomerasi Produksi ( $X_{ap}$ )	0.134	0.026	5.108	0.0000
APBD sisi Pengeluaran ( $X_{apbd}$ )	$-1.13 \times 10^{-12}$	$4.65 \times 10^{-13}$	-2.438	0.0176
Jarak Kecamatan ( $X_{jk}$ )	$-8.20 \times 10^{-5}$	0.00026	-0.314	0.7547
Pengangguran ( $X_p$ )	0.003	0.003	1.124	0.2654
R Square = 0.6076				
Adjusted R Square = 0.5647				
F   (Sig.) = 14.157   (0.000)				



Berdasarkan Tabel 4.13 hasil analisis regresi panel yang terbentuk adalah :

$$\hat{Y} = 0.299 - 0.032X_{pe} - 4.47 \times 10^{-7}X_{jp} - 0.046X_{sdm} + 0.134X_{ap} - 1.13 \times 10^{-12}X_{apbd} - 8.20 \times 10^{-5}X_{pk} + 0.003X_p$$

Variabel independen yang signifikan atau berpengaruh nyata terhadap variabel dependen (tingkat disparitas wilayah) adalah variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_{pe}$ ), aglomerasi produksi ( $X_{ap}$ ) dan APBD sisi pengeluaran ( $X_{apbd}$ ), maka persamaan regresi

tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta bernilai positif yaitu sebesar 0.299, artinya tanpa adanya pertumbuhan ekonomi ( $X_{pe}$ ), jumlah penduduk ( $X_{jp}$ ), kualitas SDM ( $X_{sdm}$ ), aglomerasi produksi ( $X_{ap}$ ), APBD sisi pengeluaran ( $X_{apbd}$ ), jarak kecamatan ( $X_{pk}$ ) dan pengangguran ( $X_p$ ) maka tingkat disparitas wilayah sebesar 0.299, nilai positif artinya tingkat disparitas wilayah cenderung meningkat.

Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penghitungan regresi panel bernilai -0,032 dan signifikan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kondisi disparitas ekonomi wilayah. Artinya setiap kenaikan 1 unit variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_{pe}$ ) akan menurunkan tingkat disparitas wilayah (Y) sebesar 0.032. Hasil ini sejalan dengan penelitian Qiao, dkk (2007) yang menemukan adanya trade-off atau hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan

Aglomerasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sama-sama meningkat tetapi tidak merata besarnya akan menumbuhkan efek disparitas antar wilayah. Pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi usaha atau konsentrasi industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (Tarigan, 2004). Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan studi empiris melalui pengaruh tingkat aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah, dimana pada model ekonometrik persamaan Disparitas ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi koefisien aglomerasi produksi sebesar 0,134 dan bernilai positif meninterpretasikan peningkatan 1 unit variabel aglomerasi produksi akan meningkatkan tingkat disparitas ekonomi wilayah sebesar 0,134.. Dari studi teori dan empiris tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat aglomerasi signifikan dan mempengaruhi secara positif terhadap disparitas ekonomi antar wilayah pada 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan koefisien pada variabel APBD sisi pengeluaran adalah sebesar  $-1.13 \times 10^{-12}$  dan bernilai negatif, artinya setiap kenaikan 1 unit variabel anggaran ( $X_{apbd}$ ) akan menurunkan tingkat disparitas wilayah (Y) sebesar  $1.13 \times 10^{-12}$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya APBD pada sisi pengeluaran akan semakin mengurangi nilai Indeks Williamson yang berarti semakin meratanya pembangunan. Walaupun jika dibandingkan dengan PDRB terlihat sangat kecil sekali nilai atau proporsi APBD terhadap PDRB, namun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memberikan kontribusi terhadap pengurangan masalah disparitas pembangunan antar wilayah. Menurut Pose (2007) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal membawa

perubahan yang signifikan terhadap pemerataan dan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah (dengan asumsi lebih dekat dengan rakyat) lebih cakap dalam membuat kebijakan yang menentukan barang publik yang dibutuhkan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah menghasilkan fungsi alokasi yang lebih efisien.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa disparitas ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tiga wilayah yang memiliki Indeks Williamsons tertinggi atau wilayah dengan tingkat disparitas ekonomi tertinggi adalah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro dan Licin. Jika diamati dari sisi pertumbuhan ekonomi ketiga wilayah tersebut tumbuh positif dengan indeks Williamsonsnya yang menunjukkan tren penurunan walaupun nilai Indeks Williamsonsnya masih tinggi dibandingkan Wilayah Kecamatan lainnya
- b. Dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, hanya ada 5 (lima) kecamatan yang masuk dalam kuadran I atau cepat-maju dan cepat tumbuh yaitu Kecamatan Muncar, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi. Kecamatan dalam kuadran II atau Wilayah Berkembang Cepat antara lain Bangorejo, Tegaldimo, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono, Giri sedangkan Kecamatan yang masuk dalam Kuadran III atau Wilayah Maju Tapi Tertekan dimana wilayah ini karakteristik tingkat laju pertumbuhan ekonomi kecamatan lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tingkat Kabupaten, namun kondisi PDRB perkapita kecamatan lebih besar dibandingkan dengan PDRB perkapita tingkat kabupaten. Wilayah yang masuk dalam kategori tersebut antara lain Kecamatan Purwoharjo, Sempu, Licin, Kalipuro dan Wongsorejo. Sedangkan Wilayah Relatif Tertinggal atau Kuadran IV dimana wilayah ini karakteristik tingkat laju pertumbuhan ekonomi kecamatan lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tingkat Kabupaten, dan kondisi PDRB perkapita kecamatan lebih kecil dibandingkan dengan PDRB perkapita tingkat Kabupaten. Wilayah yang masuk dalam kategori tersebut antara lain Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Singojuruh, dan Songgon.
- c. Pertumbuhan ekonomi, aglomerasi produksi dan APBD sisi pengeluaran. Sedangkan jumlah penduduk, kualitas SDM, jarak kecamatan dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat disparitas wilayah tetapi secara simultan, Pertumbuhan ekonomi dan APBD sisi pengeluaran berpengaruh signifikan negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kondisi disparitas ekonomi wilayah. Aglomerasi produksi berpengaruh signifikan positif terhadap disparitas ekonomi antar wilayah pada 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran berupa Pengembangan ekonomi lokal yang memperhatikan potensi sumberdaya masyarakat lokal, Perbaikan infrastruktur dasar untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur pendukung dalam rangka peningkatan produksi potensi ekonomi lokal. Peningkatan infrastruktur dalam menunjang perbaikan kualitas SDM

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, et al. 1999, *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Arsyad, Lincoln. 2010 *Pengantar Ekonomi edisi ke-5* : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2014, *Banyuwangi Dalam Angka 2014*, Kabupaten Banyuwangi.
- Basri, 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Budhy Tjahjati S., Kusbiantoro, B.S, 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Bratakusumah, Dedy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Emilia dan Imelia. 2006. *Modul Ekonomi Regional*. Jurusan Ilmu Ekonomi, FE. Universitas Jambi. Jambi.
- Karjoredjo, S, 1999, *Desentralisasi Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Fakultas Ekonomi Univerditas Satya Wacana, Salatiga
- Kuncoro, Mudarajat. 2004. *"Otonomi dan pembangunan daerah reformasi, perencanaan, strategi dan peluang"*. Jakarta: Airlangga
- LAN-BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LAN-RI.
- Mangiri, K. (2000) *"Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom (Pendekatan Model Input-Output)"*. Penerbit Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Matias, Siagian .2005 *.Aglomerasi dan Kemiskinan Perkotaan . Jurnal Wawasan Volume 11, Nomor 2 . Universitas Sumatra Utara*
- Myrdal, Gunnar. 1976. *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. Jakarta. P.T. Gramedia.

- Pose, Rodriguez, 2007. *Fiscal Decentralization, Efficiency and Growth*, Journal of Department Of Geography and Environmental, London School of Economics.London.
- Rustiadi, Ernan, 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Saragih, Bungaran. 2001. *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Pustaka Wirausaha Muda, Bogor
- Sukirno, Sadono. 1995. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta. LPFE UI
- Sadono Sukirno, 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi Ketiga. . Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sirojuzilam, 2011. *Problematika Wilayah Kota dan Daerah isparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional* : USU Press, Medan
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* , Baduase Media: Padang
- Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Edisi Pertama, Jakarta :Salemba Empat.
- Tarigan, Robinson, 2004, *Ekonomi Regional : Teori & Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P, 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C, 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Erlangga.F
- Widiarto, 2001. *Disparitas, Pemerataan dan Infrastruktur*. Widiarto @bandung2.wasantara.net.id. Universitas Sumatera Utara